

Manajemen Kebijakan Pendidikan Pemerintah Desa Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Subri Hasan*¹

IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung*¹

*¹email: subrihasan2020@yahoo.com

Abstract

This research was conducted with the aim of namely; 1). Know the village government policies in developing educational institutions, children, age, early age, in Petaling village 2). Knowing the management of educational institutions, children, age, early age, in Petaling village 3). Knowing the strategies of the village government and PAUD institutions in the development of education, children, age, early age, in Petaling village. While this type of research is qualitative with descriptive analysis. The data collection tool uses observation, interview and documentation techniques.

The results of the study are; 1). That there are six village government policies in the development of the Mutiara Bangsa PAUD institution in Petaling village, namely; *First*, the policy in using curriculum. *Second*, the policy in providing education funding assistance. *Third*, policies in the application of cultural education and character education. *Fourth*, policies in providing assistance to educators to continue their education. *Fifth*, policies in the formation and authority of school committees, and *Sixth*, policies in appointing educators. 2). Then there are four types of PAUD Mutiara Bangsa management institutions in Petaling village, namely; *First*, management in the form of planning. *Second*, management in the form of organizing. *Third*, management in the form of implementing learning activities. *Fourth*, management in the form of supervision. 3). And there are four strategies of government, village and Mutiara Bangsa PAUD institutions in the development of education, children, age, early age, in Petaling village namely; *First*, the strategy of equal opportunity in obtaining education. *Second*, the policy relevance strategy. *Third*, strategies to improve the quality of education and the resources of educators. *Fourth*, education efficiency strategies.

Artikel Info

Received:

28 April 2020

Revised:

10 May 2020

Accepted:

28 May 2020

Published:

04 June 2020

Keywords: Management, Policy, Education, Village Government, Bangka Belitung Islands Province.

Abstrak

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan yaitu; 1). Mengetahui kebijakan pemerintah desa dalam pengembangan lembaga pendidikan anak usia dini di desa Petaling 2). Mengetahui pengelolaan lembaga pendidikan anak usia dini di desa Petaling 3). Mengetahui strategi pemerintah desa dan lembaga PAUD dalam pengembangan pendidikan anak usia dini di desa Petaling. Sedangkan jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan analisis deskriptif. Alat pengumpul datanya menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.

Adapun hasil penelitian yaitu; 1). Bahwa ada enam kebijakan pemerintah desa dalam pengembangan lembaga PAUD Mutiara Bangsa di desa Petaling yakni; *Pertama*, kebijakan dalam penggunaan kurikulum. *Kedua*, kebijakan dalam pemberian bantuan dana pendidikan. *Ketiga*, kebijakan dalam penerapan pendidikan budaya dan pendidikan karakter. *Keempat*, kebijakan dalam pemberian bantuan bagi tenaga pendidik untuk melanjutkan pendidikan. *Kelima*, kebijakan dalam pembentukan dan wewenang komite sekolah, dan *Keenam*, kebijakan dalam pengangkatan tenaga pendidik. 2). Kemudian ada empat jenis pengelolaan lembaga PAUD Mutiara Bangsa desa Petaling yaitu; *Pertama*, pengelolaan dalam bentuk perencanaan. *Kedua*, pengelolaan dalam bentuk pengorganisasian. *Ketiga*, pengelolaan dalam bentuk pelaksanaan kegiatan pembelajaran. *Keempat*, pengelolaan dalam bentuk pengawasan. 3). Dan ada empat strategi pemerintah desa dan lembaga PAUD Mutiara Bangsa dalam pengembangan pendidikan anak usia dini di desa Petaling yaitu; *Pertama*, strategi pemerataan kesempatan dalam memperoleh pendidikan. *Kedua*, strategi relevansi kebijakan. *Ketiga*, strategi peningkatan kualitas pendidikan dan sumber daya tenaga pendidik. *Keempat*, strategi efisiensi pendidikan.

Kata Kunci: Manajemen, Kebijakan, Pendidikan, Pemerintah Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

A. Pendahuluan

Permasalahan pendidikan hingga sekarang ini cukup menarik untuk diperbincangkan, bukan hanya masalah pendanaan, fasilitas, penguatan tenaga pendidik, peran *stake holder*. Tentunya tidak berhenti hanya dengan permasalahan tersebut saja, masih banyak masalah-masalah lain tentang pendidikan yang *comportable* untuk di berikan solusi dan penanganan khusus dengan maksimal dan sempurna sehingga mutu pendidikan dapat terjamin dan berkualitas. Berbicara tentang beberapa hal tersebut tidak kalah pentingnya kemudian, bagaimana pendidikan tersebut dikelola dengan baik sehingga dapat berkembang sesuai dengan tujuannya dan tuntutan undang-undang dasar dalam rangka pendidikan mencerdaskan anak bangsa. Mencerdaskan anak bangsa sudah tentu dimulai dari lembaga pendidikan anak usia dini. Dengan kata lain, jika sejak dini pendidikan kepada anak telah diberikan, kemudian potensi yang ada dikelola dan dikembangkan dengan baik. Maka tidak mustahil tentunya jenjang pendidikan selanjutnya akan lebih baik dan sempurna dalam implementasinya. Termaktub dalam undang-undang

tentang perlindungan anak yang berbunyi bahwa *setiap anak berhak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran dalam rangka untuk pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya*.

Pengelolaan dan pengembangan lembaga pendidikan serta pelaksanaan program pendidikannya dalam rangka meningkatkan sumberdaya manusia (SDM) yang bermutu dan memiliki daya saing dalam segala bidang merupakan tuntutan bahkan menjadi sebuah kewajiban bagi pemerintah, karena lembaga pendidikan adalah tonggak utama dalam menjalankan program dan misi untuk mencerdaskan anak bangsa. Peningkatan kualitas anak bangsa, tentunya harus senantiasa dilakukan sebagaimana yang telah diamanahkan oleh pernyataan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan yakni “Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga Negara Indonesia atas tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah”. Atas dasar itu kemudian, bahwa pemerintah harus menjamin terlaksananya program pendidikan secara Nasional dimulai sejak tingkat

anak usia dini hingga tingkat pendidikan paling tinggi. Maka kemudian akan menjamin pemerataan kesempatan dalam bidang pendidikan. Dalam konteks pendidikan anak usia dini yang merupakan gerbang pertama dan landasan awal bagi proses pendidikan harus mendapat perhatian yang serius dan maksimal. Karena amanat undang-undang menyatakan bahwa, “Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut”.

Kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan program pendidikan yang dimulai dari lembaga pendidikan anak usia dini sebagai amanah undang-undang Republik Indonesia dan pemerataan partisipasi pendidikan harus terlaksana dimulai pada level desa dan seterusnya pada setiap provinsi. Sebagaimana disebutkan dan termaktub pada peraturan pemerintah No. 17 tahun 2010 pasal 32 ayat 1 menjelaskan,

“Bupati/walikota menetapkan target tingkat pemerataan partisipasi pendidikan pada tingkat kabupaten/kota yang meliputi; antar kecamatan atau sebutan lain yang sejenis; antar desa/kelurahan atau sebutan lain yang sejenis; dan antara laki-laki dan perempuan.” Oleh karenanya, upaya pemerintah dalam membangun lembaga pendidikan anak usia dini, pada setiap kecamatan terdapat satu lembaga pendidikan anak usia dini atau setingkatnya. Dengan adanya lembaga pendidikan anak usia dini atau taman kanak-kanak pada setiap desa atau kecamatan kemudian menjadi tanggung jawab pemerintah setempat atau pemerintah desa dalam pengembangan sekaligus pengelolaan lembaga tersebut, sebagai upaya dalam mengambil peran untuk memberikan pelayan pendidikan pada anak-anak usia dini. Pengelolaan dan pengembangan pada lembaga pendidikan anak usia dini kemudian tidaklah hanya pada pembangunan dan pengadaan fisik semata, akan tetapi pembangunan dan pengadaan sumber daya manusia dan perangkat lunak pendidikan seperti tenaga pendidik, pengelola, kurikulum, media dan sumber belajar bagi anak-anak usia dini, menjadi

agenda sekolah dan program pemerintah desa.

Berangkat dari amanah undang-undang, peraturan pemerintah dan kebijakan pemerintah tersebut, maka (*education concept*) konsep pendidikan memiliki peranan vital dan utama yakni menjadi fasilitas perantara. Kemudian menjadi sarana pengembangan kemanusiaan serta pendidikan juga menjadi sebuah investasi bagi manusia. Maknanya adalah bahwa pendidikan bertujuan lainnya yaitu sebagai sarana pertumbuhan dan pengembangan segala aspek kehidupan yang menuju arah kebaikan kemudian dapat mempengaruhi serta sebagai pijakan dan pedoman dalam proses perbaikan moralitas dan etika untuk memberdayakan dan membentuk jati/makna diri sebagai komponen bangsa (Hasan, 2000). Oleh karena begitu pentingnya makna dari pendidikan itu sendiri, makanya menjadi kewajaran apabila hakikat pendidikan adalah sebuah proses dalam menghumanisasikan manusia (Freire, 2001). Malik Fajar berpendapat bahwa humanisasi dapat mempengaruhi bagi tahapan pelaksanaan proses pendidikan yang berorientasi untuk mengembangkan dimensi memanusaiakan manusia baik

pada dimensi fisik biologisnya maupun ruhani psikologisnya. Pada dimensi ruhani psikologi inilah kemudian mencoba untuk mendesawakan menuju manusia paripurna (*insan kamil*) tentunya dengan perantara proses pendidikan merupakan aspek dasar yang memiliki potensi positif untuk menumbuhkan dan membangun hidup yang berkehidupan serta berkeadaban (Fadjar, 2004). Melalui bingkai ini, bahwa format pendidikan baik pada tataran administratif maupun secara kelembagaan bahwa pendidikan kemudian dapat dimaknai yaitu sebuah perilaku yang secara penuh kesadaran bertujuan untuk pemeliharaan dan pengembangan potensi fitrah manusia sebagai sumber daya atau potensi manusiawi untuk memperoleh dan menjadi manusia paripurna seutuhnya atau insan kamil tadi (Ahmadi, 1992). Sebagai *human resources* dan *human investment* serta sebagai potensi (sumber daya) insani menuju terbentuknya manusia seutuhnya (*insan kamil*) haruslah berangkat dan bertitik tolak dari program pendidikan anak usia dini atau taman kanak-kanak. Karena jika pada lembaga pendidikan anak usia dini diberikan pengajaran dan pendidikan

sebaik-baiknya maka tidak mustahil kemudian proses selanjutnya akan lebih mudah, terarah dan akan terwujud menjadi *insan kamil* yang memiliki potensi (sumber daya) insani yang memiliki karakter baik, bermoral dan berkualitas.

Berpijak pada ketentuan UU No. 20 Tahun 2003 mengenai SISDIKNAS atau sistim pendidikan nasional sebagai pijakan dasar bagi pelaksanaan program PAUD (pendidikan anak usia dini), sebagaimana termaktub pasal 28 ayat 1 menjelaskan "Pendidikan anak usia dini diselenggarakan bagi anak sejak lahir sampai dengan enam tahun dan bukan merupakan persyaratan untuk mengikuti pendidikan dasar". Kemudian terdapat juga dalam bunyi bab 1 pasal 1 ayat 14 menegaskan yaitu bahwa program PAUD (pendidikan anak usia dini) merupakan, "Suatu upaya pembinaan yang ditunjukkan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut". PAUD (pendidikan anak usia dini)

adalah sebuah lembaga untuk mendidik anak-anak yang berusia awal pendidikan yang dalam menyelenggarakan dan melaksanakan pendidikannya menitikberatkan untuk meletakkan pijakan dasar bagi bertumbuhnya dan berkembangnya baik secara fisikis yaitu berfungsinya motorik baik halus maupun kasar, maupun secara intelektual yakni berfungsinya daya untuk berpikir, mencipta serta kematangan emosional dan bertambahnya kepekaan secara spiritualitas. Kemudian berfungsinya perkembangan secara sosial emosional yang muncul pada perilaku dan sikap ataupun kematangan keyakinan pada agama. Kemudian berfungsinya kematangan dalam berbahasa serta berkomunikasi yang bersesuaian dengan munculnya beberapa keunikan melalui tahapan perkembangannya sebagaimana yang dialami anak-anak tersebut (Sujiono, 2009).

Dalam konteks ini kemudian bahwa penyelenggaraan pendidikan khususnya lembaga pendidikan anak usia dini yang berada di desa tentunya menjadi tanggung jawab pemerintah desa untuk menjaga, mengawasi, memelihara dan memberi perhatian dalam bentuk kebijakan dan peran-peran

strategis dalam pengelolaan dan pengembangan lembaga pendidikan bagi anak usia dini yang berada di wilayahnya. Oleh karenanya, bahwa arah kebijakan dan peran strategis dalam pengelolaan dan pengembangan lembaga pendidikan bagi anak usia dini, secara garis besarnya adalah untuk menumbuhkan jiwa mandiri pada masyarakat secara umum dan pemerintah desa khususnya dalam mewujudkan pada bidang pertahanan keamanan, hidup bersosial, aspek perkonomian serta ketahanan ekologi yang bersesuaian dengan perintah dalam UU No. 6 tahun 2014 tentang desa. Secara spesifik pemerintah desa Petaling dalam rangka mempercepat dalam membangun kemandirian di pedesaan. Oleh karenanya, perlu disusun dalam sebuah kerangka kerja dalam sebuah konsep arah dan kebijakan dalam membangun desa khususnya desa Petaling, adapun konsep tersebut yaitu; upaya meningkatkan pelayanan dalam menyelenggarakan dan mengimplementasikan beberapa kebijakan pemerintah desa dengan mewujudkan serta melaksanakan tata pengelolaan pemerintah desa yang baik

dan benar. Tata kelola tersebut dapat berupa; upaya meningkatkan pelayanan yang baik pemerintahan desa. Kemudian upaya meningkatkan pelayanan dari Badan Permusyawaratan Desa atau BPD serta lembaga terkait yang lain yang masuk dalam struktur pemerintah kemudian upaya meningkatkan pelayanan dalam mengembangkan pusat informasi dan data desa sebagai pedoman langkah dalam membuat rencana dan merumuskan perencanaan dalam membangun desa. Kemudian upaya meningkatkan jaringan network atau kesepakatan kerjasama desa. Dan upaya meningkatkan pelayanan secara administratif dan perspektif hukum dalam pembangunan desa.

Pada konteks ini, di desa petaling kecamatan Mendobarat kabupaten Bangka provinsi kepulauan Bangka Belitung memiliki tiga lembaga pendidikan anak usia dini yang memiliki ciri khas, karakter dan cara masing-masing dalam mengelola dan mengembangkan lembaga pendidikannya untuk menarik perhatian dan animo masyarakat dalam menyekolahkan anaknya pada tiga lembaga pendidikan anak usia dini tersebut. Pemerintah desa sebagai

perpanjangan tangan pemerintah pusat maupun daerah sebagai legislator, penmimpin desa, penanggung jawab desa dan pengatur kebijakan di desa tentunya harus ikut andil dalam mengelola dan mengembangkan lembaga pendidikan di desanya. Terkait dengan apa saja kebijakan-kebijakan yang memihak kepada pengelolaan dan pengembangan lembaga pendidikan anak usia dini, dengan besarnya anggaran yang dikucurkan pemerintah pusat kepada pemerintah desa tentunya dapat dimanfaatkan dan diperuntukkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan kualitas sumber daya manusianya dan kualitas pendidikan dan lembaga pendidikan di desa Petaling Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka khususnya. Berdasarkan observasi dan wawancara peneliti kepada kepala desa Petaling, bahwa ia mengatakan, "pembangunan lembaga pendidikan anak usia dini di desa Petaling ini ada yang di fasilitasi langsung oleh pemerintah provinsi seperti teman-taman kanak-kanak atau TK Pembina Mendobarat, kemudian ada sebuah lembaga pendidikan anak usia dini yang merupakan hasil swadaya masyarakat atau yang dikelola oleh

yayasan, dan satu lagi lembaga pendidikan anak usia dini yang dibangun oleh pemerintah desa melalui alokasi dana pada anggaran pemerintah desa. Namun yang menjadi perhatian adalah lemahnya pengelolaan dan pengembangan lembaga pendidikan tersebut yang disebabkan oleh banyak faktor baik internal maupun eksternal, diantaranya adalah minimnya kualitas sumber daya manusianya yaitu tenaga pendidiknya, media pembelajaran, alat permainan, rendahnya partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam menjaga, dan yang lebih penting lagi adalah kebijakan pemerintah desa dalam penegolahan dan pengembangan lembaga anak usia dini belum maskimal kemudian peran aktif pemerintah desa, perangkat desa dan lemahnya anggaran yang dialokasikan pemerintah desa ini yang menjadi kendala dan masalah dalam pengembangan lembaga pendidikan anak usai dini di desa ini (Supandi, 2018).

Tulisan ini sesungguhnya merupakan sebuah penelitian yang telah dilakukan pada tahun 2019 yang lalu. Judul sesungguhnya dari penelitian tersebut adalah kebijakan dan strategi pemerintah desa dalam pengembangan

dan pengelolaan lembaga pendidikan anak usia dini di desa Petaling Kecamatan Mendobarat Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan metode deskriptif. Kualitatif merupakan proses membuat laporan hasil penelitian dengan mendeskripsikan dan memaparkan data-data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Sedangkan metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas (Sugiyono, 2007). Teknik pengumpulan datanya yaitu dengan observasi, *interview* (wawancara), dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data yaitu melalui *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*.

Pertama, Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. *Kedua*, penyajian data bisa dilakukan dalam

bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. *Ketiga*, Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.

C. Hasil Penelitian dan Analisis

Tujuan dari penelitian ini ada tiga yaitu; *Pertama*, mengetahui dan menganalisis kebijakan pemerintah desa dalam pengembangan lembaga pendidikan anak usia dini di desa Petaling Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka?, *Kedua*, mengetahui dan menganalisis pengelolaan lembaga pendidikan anak usia dini di desa Petaling Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka?, *ketiga*, mengetahui dan menganalisis strategi pemerintah desa dan lembaga PAUD dalam pengembangan pendidikan anak usia dini di desa Petaling Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka?. Berikut hasil penelitian dan analisis melalui petikan

hasil wawancara dan observasi lapangannya.

1. Kebijakan pemerintah desa dalam pengembangan lembaga pendidikan anak usia dini di desa Petaling Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka.

Pemerintah desa Petaling Kecamatan Mendobarat adalah termasuk salah satu wilayah pemerintah daerah kabupaten Bangka di provinsi kepulauan Bangka Belitung yang mendapat wewenang kekuasaan dan wewenang dalam membuat serta menentukan kebijakan dalam menjalankan roda pemerintahan di desa. Wewenang kekuasaan dan wewenang kebijakan pemerintah desa tersebut, diamanahkan kepada seorang kepala desa dengan dibantu secara bersama-sama oleh perangkat desa seperti sekretaris desa, kepala urusan keuangan, kepala seksi pemerintahan, kepala seksi kesejahteraan dan pelayanan, staf umum, kemudian dibantu oleh para kepala dusun I s/d kepala dusun IV, yang menangani langsung masyarakat di dusun masing-masing. Selanjutnya pemerintah desa Petaling mendapat pengawasan sebagai mitra kerja yaitu badan permusyawaratan desa (BPD), dan juga pemerintah desa Petaling

memiliki seorang konsultan desa yaitu sarjana membangun desa (SMD) yang merupakan program pemerintah kabupaten Bangka menempatkan pada setiap desa di kabupaten Bangka satu orang SMD.

Ada beberapa wewenang pemerintah desa Petaling dalam membuat kebijakan termasuk wewenang kebijakan pemerintah desa dalam pengembangan lembaga pendidikan anak usia dini di desa Petaling Kecamatan Mendobarat Kabupaten Bangka. Dalam hal ini, bahwa kebijakan pemerintah desa Petaling terkait dengan pengembangan lembaga pendidikan khususnya untuk anak usia dini terbagi menjadi beberapa kebijakan. Diantara kebijakan tersebut yaitu; *Pertama*, kebijakan pemerintah desa dalam penggunaan kurikulum PAUD Mutiara Bangsa desa Petaling. Analisis peneliti dari data hasil wawancara di lapangan kepada kepala desa Bapak Ahmad Supandi (2019) dan kepala sekolah Ibu Itra Yunita (2019) bahwa pelaksanaan kebijakan kurikulum telah mengacu pada pedoman pendidikan nasional telah dilaksanakan. Begitu pula dengan kebijakan pemerintah desa Petaling dalam pengembangan lembaga PAUD

Mutiara Bangsa yaitu penerapannya sesuai dengan konteks kearifan lokal desa petaling yakni menyelaraskan kemampuan anak didik sebagai anak didik dari kampung tentu berbeda dengan anak didik yang ada di kota, kemudian tidak belaku tembang pilih dalam mendidik dan mengajar anak baik kaya atau miskin, serta mengenalkan kepada anak didik lingkungan desa petaling sekitar lingkungan sekolah dan mengajak anak didik beserta orang tua untuk menjaga serta memelihara gedung sekolah secara bersama-sama.

Kedua, kebijakan pemerintah desa dalam pemberian bantuan dana pendidikan. Peneliti menkonfirmasi kepala desa dan sekretaris desa serta kaur keuangan pemerintah desa sebagai pejabat pengambil kebijakan terkait keuangan pemerintah desa. Analisis peneliti bahwa kebijakan pemberian bantuan dana dalam pengembangan lembaga PAUD Mutiara Bangsa desa Petaling ini telah menjadi kebijakan pemerintah desa Petaling dalam hal ini direalisasikan oleh kepala desa, kemudian bantuan dana pendidikan PAUD tetap dianggarkan dalam APBDes anggaran pemerintah desa Petaling. Kemudian pihak lembaga

PAUD mengapresiasi dan menyambut dengan baik intervensi pendanaan dari pemerintah desa Petaling serta dana pengembangan lembaga PAUD ini juga bersumber dari biaya mandiri yaitu dari pembayaran SPP anak didik. Beberapa pengembangan lembaga PAUD Mutiara Bangsa desa Petaling ini terkait dengan kebijakan anggaran pendidikan dari pemerintah desa Petaling terlihat dengan jelas dari kondisi bangunan/gedung PAUD, fasilitas pendidikan dan pengajaran, sarana dan prasarana pembelajaran meskipun belumlah sempurna namun secara bertahap sesuai dengan kemampuan financial lembaga PAUD sendiri dan kucuran bantuan dana dari pemerintah desa Petaling dapat berkembang dengan baik untuk ukuran lembaga pendidikan di desa atau kampung (Ridwan & Yusnia, 2019).

Ketiga, kebijakan pemerintah desa dalam penerapan pendidikan budaya dan pendidikan karakter. Peneliti mewawancarai desa, kasi kesejahteraan umum dan pelayanan serta kepala sekolah dan guru kesimpulan dan analisis peneliti terkait dengan kebijakan ini, bahwa ada keselarasan dan kerjasama yang baik antara pemerintah desa Petaling dengan pihak lembaga

PAUD Mutiara Bangsa dalam menyikapi kebijakan pemerintah desa Petaling (Yani, Yunita, & Fitri, 2019). Keselerasan dan kerajasama yang baik ini nampak terlihat pada pelaksanaan program pendidikan dan pengajaran PAUD dapat berjalan dengan baik dan lancar dan masing-masing menerima masukan baik positif maupun negatif. Kebijakan pemerintah desa Petaling dalam pengembangan lembaga PAUD Mutiara Bangsa desa Petaling ini tetap dilaksanakan oleh pihak pengelola lembaga setelah dilaksanakannya mekanisme rapat atau musyawarah dan melalui beberapa pertimbangan yang matang.

Keempat, kebijakan pemerintah desa dalam pemberian bantuan bagi tenaga pendidik untuk melanjutkan pendidikan. Berikut hasil wawancara peneliti kepada kepala desa Petaling;

“Menurutnya bahwa berdasarkan Permendagri no.20 tahun 2018 bahwa prioritas dana Desa focus kepada Pendidikan. 1). Memberi dukungan sepenuhnya bagi pendidik dalam kegiatan peningkatan mutu, pada tahun 2020 akan diselenggarakan pelatihan guru PAUD oleh pemerintah desa Petaling. 2). Mendukung sekali demi meningkatkan kompetensi pendidik. 30. Akan dilaksanakan namun sekarang masih fokus pada kegiatan desa dan pembangun jalan dan pemberdayaan. 4).

Ada dan memang akan ditambah lagi pembangunannya untuk tahun selanjutnya. 50. Untuk tahun sekarang belum dilaksanakan tetapi akan dianggarkan pada tahun 2020 nanti. 6). Akan memberikana sarana pembelajaran demi kemajuan proses KBM sekolah. 7). Memberikan sepenuhnya dukungan demi terlaksananya kegiatan dan lembaga PAUD namun masih usulan untuk dianggarkan APBDes. 8). Rencana akan dilaksanakan pada tahun 2020, begitu pula sumur bor dianggarkan untuk PAUD tetapi ada yang urgen sekali yaitu harus dibuat pagar sekolah untuk keamanan anak-anak dan lembaga sekolah” (Supandi, Kebijakan pemerintah Desa dalam Pemberian Bantuan Bagi Tenaga Pendidik , 2019).

Kemudian hasil wawancara peneliti kepada sekretaris desa tentang dukungan pemerintah desa Petaling terhadap peningkatan mutu PAUD, sebagaimana hasil wawancara sebagai berikut;

“Saya selaku sekretaris desa tentunya sangat mendukung sekali program kegiatan yang berkaitan dengan PAUD Mutiara Bangsa begitu pula sangat mendukung sekali dalam peningkatan mutu pendidik, namun kami berusaha untuk masuk dalam anggaran APBDes karena ada BOP dari lembaga oleh dinas pendidikan dan ada lokal kelas yang sudah dibangun di lembaga PAUD Mutiara Bangsa, sekarang sedang pelaksanaan siring pasangan di PAUD dan pembangunan pagar sekolah, begitu pula dengan APE luar dan dalam akan dianggarkan di APBDes, insentif guru ada di anggaran APBDes” (Supandi,

Dukungan Pemerintah Desa Terhadap Peningkatan Mutu, 2019).

Kemudian konfirmasi peneliti kepada pihak pengelola PAUD, berdasarkan wawancara peneliti kepada kepala sekolah beserta tenaga pendidik mereka mengungkapkan bahwa,

“Pihak pemerintah desa memang telah menyiapkan sarana dan prasarana, insentif pendidik dari dana desa, apa yang menjadi kebutuhan PAUD dikondisikan oleh kepala desa dengan paguyuban masyarakat atau wali murid dan pada tahun 2020 rencana akan menambahkan lokal kelas dan pemerintah desa memberi peluang bagi lulusan SI PAUD yang belum bekerja. Kemudian pada lembaga PAUD untuk biaya SPP anak dibebaskan/biaya sekolah bulanan anak gratis, pendidik dari tenaga profesional (SI PAUD), biaya pendaftaran gratis, sarana dan prasarana luar dan dalam terus dimaksimalkan setiap tahunnya demi kemajuan lembaga PAUD. Dari pemerintah desa mengkoordinir sepenuhnya dimulai dari sumber daya manusia sampai sarana prasarananya dan meningkatkan kompetensi pendidikan guru dengan memfasilitasi pendidik untuk ikut kegiatan pelatihan PAUD dan seminar PAUD. Kemudian memfasilitasi pendidik dalam kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kualitas profesional pendidik seperti study banding ke sekolah-sekolah yang mempunyai kualitas / mutu pendidikan yang baik, memfasilitasi pendidik dalam kegiatan pendidikan dan menyelenggarakan kegiatan parenting day, memfasilitasi pendidik dalam kegiatan pendidikan karakter dan pendidikan kecerdasan majmuk. Seperti

pelatihan dan diklat PAUD. Kemudian pendidik dilatih dalam kegiatan diklat dan pelatihan sosial emosional dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sosial di lembaga PAUD seperti gotong royong, santunan anak yatim, dan santunan bagi anak kurang mampu, bekerjasama dengan tokoh pendidikan dan pihak terkait dalam pelaksanaan kurikulum yang baik, kemudian menyelenggarakan kegiatan *Parenting Day* di sekolah dan mengadakan rapat koordinasi dengan wali murid beserta tokoh masyarakat dan tokoh pendidikan dan menyelenggarakan kegiatan yang melibatkan PAUD sekecamatan mendobarat baik itu Himpauldi maupun IGTKI kecamatan serta menyelenggarakan kegiatan-kegiatan desa dan kegiatan PAUD dengan mengundang wali murid, masyarakat, lembaga PAUD lainnya. Kegiatan sosialisasi PAUD” (Yunita & Kartina, *Penyiapan Sarana dan Prasarana dari Dana Desa*, 2019).

Kelima, kebijakan pemerintah desa dalam pembentukan dan wewenang komite sekolah. Menurut hemat dan analisis peneliti tentang kebijakan pemerintah desa Petaling dalam pengembangan lembaga pendidikan PAUD yang berhubungan dengan kebijakan pembentukan dan wewenang komite sekolah telah menjalankan azas demokrasi dalam pembentukannya, menyerahkan kepada pihak sekolah dalam proses pemilihan dan pembentukan komite sekolah, dan

menyarankan untuk rapat komite satu kali dalam satu bulan, komite sekolah sebagai mitra kerja PAUD juga dapat menjalankan tugasnya dengan baik atas dukungan dan kebijakan-kebijakan pemerintah desa yang konstruktif bagi pengembangan lembaga pendidikan di desa Petaling ini pada umumnya.

Keenam, kebijakan pemerintah desa dalam pengangkatan tenaga pendidik. Terkait dengan hal ini sebagaimana wawancara peneliti kepada pemerintah desa Petaling bahwa;

“Pengangkatan tenaga pendidik untuk PAUD Mutiara Bangsa ini kami serahkan kepada pihak sekolah namun kami hanya menyarankan harus ada proses seleksi paling tidak criteria utamanya adalah sudah sarjana khususnya PAUD, di Bangka Belitung ini sudah banyak sarjana-sarjana lulusan PAUD dan ini bisa diberdayakan, kami tidak begitu jauh mengintervensi pihak pengelola namun kami tetap mengawasi dan memberi masukan yang positif kepada pihak sekolah” (Ahmad Supandi, 2019).

Begitu juga ketika peneliti mengkonfirmasi pernyataan tersebut kepada pihak sekolah,

“Saya selaku kepala sekolah dan juga sebagai tenaga pendidik sangat bersyukur sekali bahwa di Bangka Belitung ini sudah banyak yang sarjana PAUD khususnya sehingga kami tidak mengalami kesulitan dalam menjaring tenaga pendidik, pihak pemerintah desa

menyerahkan kepada kami sepenuhnya terkait dengan pengangkatan guru untuk PAUD kami ini, saya kira pihak pemerintah desa Petaling cukup kooperatif dan demokratis dalam hal ini” (Yunita, Kebijakan Pengangkatan Tenaga Kependidikan, 2019).

Kesimpulan peneliti bahwa, kebijakan pemerintah desa dalam pengembangan lembaga pendidikan anak usia dini di desa Petaling ini cukup demokratis dan inovatif sehingga pihak pengelola tidak merasa terbebani dengan aturan dan kebijakan pemerintah desa. Kebijakan-kebijakan pemerintah desa Petaling untuk mengembangkan lembaga pendidikan anak usia dini di desa Petaling ini khususnya PAUD Mutiara Bangsa ini sangat berpihak sekali kepada sekolah artinya hak dan wewenang pihak sekolah tetap diserahkan sepenuhnya untuk mengelola dan mengembangkan lembaga ini.

2. Pengelolaan Lembaga PAUD Mutiara Bangsa Desa Petaling Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka.

Pengelolaan lembaga PAUD Mutiara Bangsa desa Petaling dikelola secara mandiri, tidak berafiliasi dengan lembaga lainnya atau pemerintah, melainkan murni milik desa Petaling yang mana pendanaannya ditopang oleh pemerintah desa Petaling melalui

kebijakan kepala desa. Penelolaan lembaga PAUD Mutiara Bangsa desa Petaling ini dapat dibagi dalam beberapa bidang diantaranya yaitu; *Pertama*, pengelolaan dalam bentuk perencanaan. *Kedua*, pengelolaan dalam bentuk pengorganisasian. *Keempat*, pengelolaan dalam bentuk pengawasan.

Analisis peneliti terhadap empat aspek pengelolaan lembaga PAUD Mutiara Bangsa desa Petaling ini adalah; *Pertama*, mengapa perlu pengelolaan dalam bentuk perencanaan yaitu sebagai pedoman dalam kegiatan supervisi, monitoring maupun kegiatan evaluasi, sehingga pelaporannya dapat dipertanggungjawabkan, kemudian sebagai alat kontrol untuk tindakan preventif, bilamana perlu mengadakan perubahan-perubahan karena adanya penyimpangan, selanjutnya menjamin efisiensi dan efektivitas karena segala sesuatunya telah diperhitungkan berdasarkan data yang objektif dan sebagai dasar untuk mengantisipasi terjadinya hambatan dalam implementasi program PAUD. *Kedua*, pengelolaan dalam bentuk pengorganisasian. Pengorganisasian merupakan aktivitas menyusun dan membentuk hubungan-hubungan kerja

antara orang-orang sehingga terwujud satu kesatuan usaha dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Didalam pengorganisasian terdapat adanya pembagian tugas-tugas, wewenang dan tanggung jawab secara terperinci menurut bidang-bidang dan bagian-bagian sehingga terciptalah hubungan kerja yang harmonis dan lancar menuju pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Pengorganisasian PAUD Mutiara Bangsa ini telah dikelola dengan baik, dimana aktivitas pembelajaran telah tertuang pada perencanaan pembelajaran dalam bentuk RPPM dan RPPH. Kemudian tugas, wewenang dan tanggung jawab masing-masing telah tersusun dan terstruktur sebagaimana telah disepakati dalam kelompok kerja guru PAUD. Dengan pengelolaan pengorganisasian yang baik ini maka semua aktivitas pengelolaan PAUD Mutiara Bangsa dapat tercipta hubungan kerja yang cukup harmonis, lancar dan dapat mencapai tujuan sebagaimana yang telah direncanakan. *Ketiga*, pengelolaan dalam bentuk pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Yaitu pengaturan proses belajar mengajar agar tercipta proses belajar mengajar yang efektif dan efisien, apa

yang dilakukan oleh PAUD Mutiara Bangsa yaitu menyusun program kerja tahunan, menyusun kalender pendidikan, menyusun jadwal kegiatan belajar, menyusun program semester, RPPM dan RPPH, kemudian mengatur pembukaan tahun ajaran baru, mengatur pelaksanaan program kegiatan belajar, mengatur kegiatan bermain, dan mengatur evaluasi program pembelajaran, serta mengatur kegiatan penutupan tahun ajaran. *Keempat*, pengelolaan dalam bentuk pengawasan. Secara umum pengawasan dikaitkan dengan upaya untuk mengendalikan, membina dan perluasan pengendalian mutu. Hakekat pengawasan adalah mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan-penyimpangan, pemborosan-pemborosan kegiatan dalam mencapai tujuan. Pengawasan merupakan proses pengamatan dan pelaksanaan seluruh kegiatan lembaga PAUD untuk mengumpulkan data dalam usaha mengetahui ketercapaian tujuan dan kesulitan yang ditemui dalam pelaksanaan. Adapun prinsip-prinsip pengawasan pada PAUD Mutiara Bangsa ini yaitu; objektif, demokratis, kerjasama, konstruktif, kreatif, sistematis, terencana dan

berkesinambungan. Apa yang dilakukan oleh pengelola PAUD Mutiara Bangsa ini dalam pengelolaan dalam bentuk pengawasan yaitu melakukan kunjungan kelas, observasi, percakapan pribadi, kunjungan antar kelas/sekolah dan mengadakan rapat rutin.

3. Strategi Pemerintah Desa dan Lembaga PAUD Mutiara Bangsa Dalam Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Petaling Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka

Pemerintah desa Petaling selalu berupaya agar lembaga pendidikan di desa Petaling terus dikelola dengan baik dan berkembang seiring dengan kebutuhan dan respon masyarakat terhadap pentingnya pendidikan terlebih pendidikan anak usia dini. Pemerintah desa Petaling senantiasa memprioritaskan bidang pendidikan menjadi asset bagi masyarakat secara luas. Oleh karenanya dalam pengembangan lembaga pendidikan khususnya lembaga PAUD Mutiara Bangsa desa Petaling ini, pemerintah desa melakukan beberapa strategi dalam mengembangkannya. Paling tidak analisis peneliti ada 4 strategi pemerintah desa dan lembaga PAUD yang telah dilakukan, yaitu; *Pertama*,

strategi pemerataan kesempatan dalam memperoleh pendidikan. *Kedua*, strategi relevansi kebijakan. *Ketiga*, strategi peningkatan kualitas pendidikan dan sumber daya tenaga pendidik. *Keempat*, strategi efisiensi pendidikan.

Berlandaskan petikan wawancara diatas, maka analisis peneliti bahwa strategi pemerintah desa dan lembaga PAUD Mutiara Bangsa dalam pengembangan pendidikan anak usia dini di desa Petaling telah dilakukan melalui empat strategi. *Pertama*, strategi pemerataan kesempatan yakni persamaan kesempatan (*equality of opportunity*) belajar bagi semua anak usia dini di desa Petaling dengan tidak melihat tingkat ekonomi keluarga. Bagi yang tidak mampu, maka biaya pendidikannya akan ditanggung oleh pemerintah desa melalui anggaran yang telah dipersiapkan dalam APBDes Petaling. Kemudian memberikan aksesibilitas kepada pengelola dan tenaga pendidik PAUD Mutiara Bangsa ini untuk memperoleh informasi tentang program kerja pemerintah desa dan program kerja lembaga PAUD agar ada persamaan persepsi khususnya terkait dengan program pendidikan anak usia dini. Selanjutnya menerapkan keadilan

dan kewajaran (*equality*) bagi pemerintah desa dalam membuat kebijakan serta pengelolaan dan pengembangan pendidikan dan pengajaran oleh pihak pengelola lembaga PAUD.

Kedua, pemerintah desa dan lembaga PAUD Mutiara Bangsa menerapkan strategi relevansi pendidikan. Yakni pengelolaan dan pengembangan lembaga pendidikan haruslah menyentuh aspek kebutuhan dan kepentingan masyarakat sebagai stake holder yang mencakup akses informasi pelaksanaan program pembelajaran PAUD, akses perkembangan anak didik, akses relevansi program pendidikan dengan kearifan lokal desa Petaling dan akses keterlibatan orang tua atau masyarakat terhadap pengembangan lembaga PAUD Mutiara Bangsa desa Petaling ini. *Ketiga*, strategi peningkatan mutu pendidikan dan sumber daya tenaga pendidik. Yaitu dimana pemerintah desa Petaling menganggarkan biaya pendidikan lanjutan kepada tenaga pendidik PAUD untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi, mendorong dan memfasilitasi biaya pelatihan atau workshop bagi

tenaga pendidik PAUD, menyediakan fasilitas sumber belajar dan bacaan bagi tenaga pendidik dan peserta didik di PAUD, mengikutsertakan tenaga pendidik dan peserta didik dalam ajang perlombaan pendidikan baik pada tingkat kecamatan atau kabupaten dan mensinergikan kualitas lembaga PAUD Mutiara Bangsa dengan PAUD lainnya yang ada di kabupaten Bangka.

Keempat, strategi efisiensi pendidikan, maksudnya adalah kebijakan-kebijakan pemerintah desa dalam pengembangan lembaga pendidikan PAUD Mutiara Bangsa ini harus mengacu pada upaya untuk menjadikan pendidikan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Yaitu mencapai *out put* pendidikan yang maksimal dengan biaya yang wajar. Efisiensi biaya pendidikan yang dapat terjangkau oleh semua lapisan masyarakat dan efisiensi pengelolaan pendidikan yang menitik beratkan pada proses daripada hasil.

D. Simpulan

Berdasarkan analisis hasil penelitian tentang kebijakan dan strategi pemerintah desa dalam pengembangan dan pengelolaan lembaga pendidikan

anak usia dini di desa Petaling Kec. Mendobarat Kab. Bangka dapat diambil kesimpulan yaitu;

1. Kebijakan pemerintah desa dalam pengembangan lembaga PAUD Mutiara Bangsa di desa Petaling kecamatan Mendobarat kabupaten Bangka, bahwa ada empat kebijakan pemerintah desa yang telah dilakukan yakni; *Pertama*, kebijakan pemerintah desa dalam penggunaan kurikulum PAUD Mutiara Bangsa desa Petaling. *Kedua*, kebijakan pemerintah desa dalam pemberian bantuan dana pendidikan. *Ketiga*, kebijakan pemerintah desa dalam penerapan pendidikan budaya dan pendidikan karakter. *Keempat*, kebijakan pemerintah desa dalam pemberian bantuan bagi tenaga pendidik untuk melanjutkan pendidikan. *Kelima*, kebijakan pemerintah desa dalam pembentukan dan wewenang komite sekolah, dan *Keenam*, kebijakan pemerintah desa dalam pengangkatan tenaga pendidik.
2. Pengelolaan lembaga PAUD Mutiara Bangsa desa Petaling kecamatan Mendobarat kabupaten

Bangka, bahwa pihak pengelola lembaga pendidikan anak usia dini di Petaling ini telah melakukan empat hal yaitu; *Pertama*, pengelolaan dalam bentuk perencanaan. *Kedua*, pengelolaan dalam bentuk pengorganisasian. *Ketiga*, pengelolaan dalam bentuk pelaksanaan kegiatan pembelajaran. *Keempat*, pengelolaan dalam bentuk pengawasan.

- Adapun strategi pemerintah desa dan lembaga PAUD Mutiara Bangsa dalam pengembangan pendidikan anak usia dini di desa Petaling kecamatan Mendobarat kabupaten Bangka yakni melalui empat strategi pemerintah desa dan lembaga PAUD yang telah dilakukan, yaitu; *Pertama*, strategi pemerataan kesempatan dalam memperoleh pendidikan. *Kedua*, strategi relevansi kebijakan. *Ketiga*, strategi peningkatan kualitas pendidikan dan sumber daya tenaga pendidik. *Keempat*, strategi efisiensi pendidikan.

Ahmad Supandi. (2019, Juli 25). Kebijakan Pengangkatan Tenaga Pendidik. (S. Hasan, Interviewer)

Ahmadi. (1992). *Islam: Paradigma Ilmu Pendidikan*. Yogyakarta: Aditya Media.

Fadjar, M. (2004). *Membuka Jendela Pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Freire, P. (2001). Pendidikan: Kegelisahan Sepanjang Zaman. *Jurnal Resensi Amanat*, 1, 16.

Hasan, K. (2000). Konsep Pendidikan Jawa. *Jurnal Dinamika Islam dan Budaya Jawa*, 3(3), 29.

Ridwan, & Yusnia, H. (2019, Juli 27). kebijakan Pemerintah Desa dalam Pemberian Bantuan Dana Pendidikan. (S. Hasan, Interviewer)

Sugiyono. (2007). *Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif dan Kualitatif R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sujiono, Y. N. (2009). *Konsep Dasar Pendidikan Anak Usia Dini*. Jakarta: PT Indeks.

E. Daftar Pustaka

- Supandi, A. (2018, Juli 15). Alokasi Dana Desa untuk Pendidikan. (S. Hasan, Interviewer)
- Supandi, A. (2019, Juli 26). Dukungan Pemerintah Desa Terhadap Peningkatan Mutu. (S. Hasan, Interviewer)
- Supandi, A. (2019, Juli 25). Kebijakan Kurikulum. (S. Hasan, Interviewer)
- Supandi, A. (2019, Juli 25). Kebijakan pemerintah Desa dalam Pemberian Bantuan Bagi Tenaga Pendidik. (S. Hasan, Interviewer)
- Yani, M., Yunita, I., & Fitri. (2019, Juli 28). Kebijakan Pemerintah Desa dalam Penerapan Pendidikan Budaya dan Pendidikan Karakter. (S. Hasan, Interviewer)
- Yunita, I. (2019, Juli 28). Kebijakan Pengangkatan Tenaga Kependidikan. (S. Hasan, Interviewer)
- Yunita, I. (2019, Juli 28). Pelaksanaan Kebijakan Kurikulum. (S. Hasan, Interviewer)
- Yunita, I., & Kartina. (2019, Juli 29). Penyiapan Sarana dan Prasarana dari Dana Desa. (S. Hasan, Interviewer)